

IDENTITAS ETNIK DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL ORANG MAKEANG DI TERNATE

Junaib Umar, SS, M.Si
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu budaya
Email: junaibumar18@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan menganalisis permainan strategi politik, dan reproduksi identitas kekinian orang Makeang dalam hubungan dengan sejarah “Maloku Kie Raha”. Penelitian ini dilakukan di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan mendeskripsikan secara mendalam tentang sejarah, dinamika politik lokal dan reproduksi identitas dan kekuasaan orang Makeang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, wilayah Makeang secara historis merupakan kerajaan pertama dari empat kesultanan Moloku Kie Raha (Ternate, Tidore, Moti dan Makeang) pada abad 13 yang dilatarbelakangi hubungan perkawinan antara Djafar Sadek dan Siti Nursifa Putri Kahyangan. Dari hasil pernikahan itu lahirlah putra pertama bernama Muhammad Bakir, yang kemudian ditetapkan sebagai raja Makeang yang berkuasa di Makeang. Sementara dari konteks kekinian, orang Makeang secara politik cenderung mendominasi pentas politik di Ternate. hal ini terlihat dengan eksistensi orang Makeang yang duduk sebagai anggota legislatif Kota. Bahkan, Walikota pertama Ternate dan Gubernur pertama Maluku Utara adalah orang Makeang, adalah Thaib Armayin.

Kata Kunci: Makeang, Identitas Etnik, Dinamika Politik Lokal.

ABSTRACT. To understand historical dynamics of the *Makean* and the complexty of local political dynamic in Ternate and to analyze game of strategy, current identity reproduction, and power of the *Makian* in relation to *Maloku Kie Raha* history. The study was couducted in ternate, Nort Maluku province. The study was qualitative. The data were collected through intervie, observation, library research, and dokumentation. The results of the study indicate that historically the *Makian* region was the first kongdom of the four Maluku Kie Raha sultanates: *Makian (Bacan)*, *Ternate Moti (Jailolo)* and *Tidore* in the 13th century with a backdrop of the marriage relationship between *Djafar Sadek* and *Siti Nursifa Putri Kahyangan*. From this marriage the first son was born named *Muhammad Bakir* who became the king of *Makian*. From the present context, the *Makian* tends to dominate politik in *Trnate*. This is apparent from the exixtence of the *Makian* who became the town legilations. Even the frist mayor in Ternate and the first Governoer in North Maluku was the *Makian*, namely *Thaib Armayin*.

Keywords: *Makeang*, *Etnicts identity*, *Dynamics of politic local*.

PENDAHULUAN

Sejak perkembangan ilmu antropologi, definisi “budaya” atau “kebudayaan” telah dirumuskan dan dikemukakan oleh para ahli (antropologi). Edward B Taylor dalam Saifuddin, (2005), mengungkapkan bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1987), juga mengemukakan bahwa perwujudan dari kebudayaan (material) itu sendiri adalah benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, kesenian (termasuk perpolitikan), yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Barth (1988), mengatakan bahwa etnik adalah himpunan manusia dapat dipahami melalui kesamaan ras, agama, asal usul bangsa atau pola-pola perilaku dan keyakinan (dimediasi oleh simbol) yang dipelajari, rasional, terintegrasi, dimiliki bersama, yang secara dinamik-adaptif dan yang tergantung pada interaksi sosial manusia demi eksistensi mereka. Sementara Rudysah (2009), menulis bahwa para ilmuwan sosial melihat fenomena sosial lebih dari sekedar urutan peristiwa yang penggalan-penggalannya dapat diingat, serta masa lalu selalu relevan dengan masa sekarang. Inilah yang hendak penulis lakukan sekaitannya dalam konteks dinamika politik lokal bahwa salah satu cara untuk memahami makna sejarah adalah dengan disiplin ilmu antropologi yang berusaha untuk menggambarkan serta menafsirkan dinamika kesejarahan, pola-pola budaya, perilaku ataupun struktur yang berisi nilai

dan aturan-aturan yang berfungsi secara sosial dalam dinamika politik lokal.

Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa hasil penelitian tentang dinamika politik lokal dari berbagai perspektif, termasuk kajian sosio-historisnya. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Yanuarti (2004), tentang perkembangan orang Makeang di Maluku Utara. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Muhammad (2004), yang meneliti tentang tinjauan historis dalam sosial, ekonomi dan dinamika politik kolonial kaum bangsawan Kesultanan Ternate.

Hasil penelitian lainnya dapat dilihat dari penelitian Fahmis (2011), tentang proses pembentukan elit etnis Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa empat fase transformasi proses pembentukan elite etnis Bugis dan Makassar. Pada fase tradisional, pembentukan elite didominasi oleh pengaruh pengetahuan simbolik dan tanda-tanda alam. Simbol budaya sangat berpengaruh dalam proses pembentukan elite, misalnya konsep tomanurung menjadi alat reproduksi kekuasaan. Sementara Roth (2007) dan Bakti (2007), juga meneliti bahwa memberikan gambaran pentas kontestasi politik di Sulawesi Selatan yang masih bersifat partikular kajiannya pada peneguhan eksistensi kaum bangsawan lokal di era otonomi daerah. Politik lokal merupakan suatu fenomena sosial budaya yang kompleks dan memiliki makna yang multitafsir, sekaitannya dengan relasi-relasi yang terbangun antar politisi. Politik lokal sebagai fenomena sosiokultural, tentunya memiliki multimakna dalam berbagai perspektif, salah satunya adalah tentang isu-isu politik kekuasaan. Keterlibatan etnis Makeang dalam kontestasi kekuasaan di semua bidang terkadang bukan merupakan hal yang tidak disengaja tetapi secara sadar dilakukan, baik diawali keinginan secara individu

dalam perpolitikan tersebut mauoun reproduksi identitas. Fenomena yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara etnis Makeang dan dinamika politik. Oleh karena itu, untuk mengkajinya diperlukan dasar teoritis dengan menganggap keduanya berada dalam suatu fenomena sosial-budaya, atau berkaitan erat dengan struktur yang berisi peranan dan aturan-aturan yang berfungsi secara sosial. Harker (2009), menyebutkan bahwa pendekatan struktur generatif yang ditawarkan oleh Bourdieu (1977), dapat digunakan sebagai kerangka teori dan metode untuk memahami fenomena yang terjadi antar aktor dalam struktur sebagai suatu kompleksitas realitas sosial dalam kajian antropologi.

Studi ini berawal dari fenomenaaktifitas para “politisi” secara individu ataupun “putra-putri (etnis Makeang)” secara individu yang dalam moment pesta demokrasi tampil dengan strategi yang diasumsikan “bermakna politis”. Kasus-kasus tersebut berupa strategi, tradisi (nilai dan negosiasi), atau yang berwujud perilaku atau tindakan politik. contoh kasus yang dijadikan sebagai setting awal penelitian ini adalah fenomena yang terjadi dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara dan legislatif dimana para praktisi politik (etnis Makeang) yang berada dalam struktur politik maupun yang bergabung dalam “kekuasaan” dengan segala strateginya, turut hadir dan berpartisipasi menjadi kandidat, yang diinterpretasikan sebagai dinasti politik “jaring-jaring politik lokal” dari kekuasaan orang Makian dalam arena kontestasi dibidang politik, birokrasi di pemerintahan Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Rudyansyah (2009), mengatakan bahwa pendekatan sejarah dalam konteks kehidupan nyata dilakukan bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan diamati multi sumber bukti dimanfaatkan.

Menyikapi fenomena yang diangkat sebagai isu dalam penelitian in, maka pendekatan kualitatif sangat tepat untuk digunakan. Fenomena yang menjadi fokus penelitian adalah kualitas dalam hubungan sejarah, yaitu etnis Makeang dalam masa kesultanan (posisi distruktur pemerintahan kesultanan) serta etnis Makeang di bidang politik dalam struktur kekuasaan di Maluku Utara. Apalagi strategi atau jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sebab dinamika politik lokal merupakan satuan atau terdiri dari beberapa cabang di dalamnya, sementara di lain sisi, politik merupakan fenomena yang seringkali tidak nampak secara tegas. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini merupakan studi kasus pada dinamika politik lokal, sekaitannya dengan identitas orang Makeang dalam membangun kekuasaan di Kota Ternate Maluku Utara.

Prosedur Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penelitian, selain sebagai peneliti, penulis juga sebagai bagian dari masyarakat Makeang (*insider*). Demikian, posisi penulis dalam penelitian ini sebagai *native anthropology* penulis sebagai peneliti akan meneliti kebudayaan sendiri, ada anggapan yang muncul bahwa seorang *native anthropology* akan mengalami bias kebudayaannya karena ia meneliti kebudayaan sendiri. Menurut Ilmi (2003) tidak sepenuhnya benar, karena

semakin jauh kita memahami kebudayaan sendiri maka kita akan semakin awam dengan kebudayaan kita sendiri. Dengan demikian, posisi penulis telah memiliki pengalaman, pengetahuan dan gambaran, berkenaan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Hal tersebut penulis juga alami selama proses penelitian, semakin penulis mendalami kebudayaan etnis Makeang penulis semakin menyadari bahwa ada banyak hal yang belum diketahui. Merujuk pada pendekatan yang digunakan selama proses penelitian, yaitu pendekatan kualitatif. Untuk itu, ada beberapa prosedur kerja yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu penentuan lokasi penelitian dan penentuan subyek (informan) penelitian.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan, penelitian ini menjadikan orang Makeang; identitas etnik sebagai objek kajian dan dinamika politik lokal, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah luasnya lokasi penelitian. Hal ini disebabkan karena keberadaan orang Makeang ada di setiap daerah (kecamatan/kelurahan) di Kota Ternate, terlebih penelitian ini berkenaan dengan relasi antara keduanya.

Adapun penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dimana lokasi penelitian dilakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa belum ada yang meneliti secara khusus kipra orang Makeang di Ternate adalah yang tentunya representasi dari pusat pemerintahan di Kota Ternate, pusat kegiatan pemerintahan, dan politik lokal serta pusat kekuasaan. Di Kota Ternate, terdapat beberapa tempat titik dalam pengumpulan data, seperti di rumah informan ataupun instansi terkait seperti di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Rumah Jabatan Politisi, Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD Kota Ternate, Kantor Wali kota, sekretariat partai-partai

politik yang ada di Kota Ternate, bahkan di kampus Universitas Khairun dan Sekolah Tinggi Agama.

Upaya untuk menghasilkan data yang akurat dalam melakukan wawancara dengan informan, maka penulis juga menentukannya secara sengaja (*purposive*). Informan yang dipilih tentunya adalah orang Makeang yang berada di lingkungan elit politik dan birokrasi (kepala dinas ataupun pejabat esalon I, II, dan III) serta tokoh adat, sultan selaku penguasa tertinggi (kepala pemerintah) dalam struktur pemerintahan di Kesultanan, *bobato dunia* dan *bobato akhirata*, anggota Dewan serta masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan perpolitikan, akademisi dan budayawan lokal yang di anggap menguasai dinamika historis dan kebudayaan etnis Makeang.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dimana di dalamnya terdapat banyak teknik pengumpulan data. Sehingga, metode ini menekankan keberadaan peneliti dalam kegiatan penelitian dan melakukan tatap muka dengan para informan. Tentu saja metode ini sangat tepat digunakan sebab berkaitan erat dengan keberadaan atau posisi peneliti dalam penelitian, sebagaimana penjelasan di atas. Keberagaman teknik pengumpulan data menjadi sebab dipilihnya metode ini sebagai cara di dalam pengumpulan data. Meski demikian, dalam penelitian nantinya penulis hanya akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka, Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan Pengamatan (*observation*). Sementara klasifikasi data berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

Analisa Data

Data-data yang telah ditemukan dalam proses penelitian, kemudian dianalisis menggunakan dasar pemahaman kualitatif yang menekankan pada tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan tahap pertama dalam menganalisa data, dimana dalam tahap ini berisi kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Dari penguraian tersebut maka ditemukan pola-pola jawaban yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk dianalisa berdasar maksud masing-masing jawaban. Setelah itu, hal terakhir adalah penarikan kesimpulan dari tiap jawaban berkenaan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dinamika Historis Orang Makian

Hasil kajian pustaka terkait dengan sejarah di Maluku Utara adalah bahwa Makeang dikenal sebagai kerajaan pertama di Maluku Utara pada abad 13 Muhammad Bakir sebagai raja pertama. dalam proses perkembangannya, Muhammad Bakir migrasi ke Pulau Kaseruta (Halmahera Selatan). Asal-usul orang Makeang dalam karya penelitian sejarah dan kajian arkeologis daerah Maluku Maluku Utara membuktikan bahwa kawasan ini telah ada kehidupan manusia sejak zaman es (*pleistosen*) kurang lebih 30.000 tahun yang silam. Situs dan benda pra-sejarah di temukan di Pulau Waidoba, Teniti (Kayoa), Doro Kao dan Tanjung Luari (Tobelo). Sementara benda peninggalan batu besar berupa (*megalitik*) di temukan di Ternate dan batu kecil (*neolitik*) di temukan di Waidoba.

Selanjutnya terkait dengan penghuni awal di wilayah Makeang informan Mukti mengungkapkan bahwa...

orang Poloiri, orang Somsuma, orang Matangtegang, orang Babarer, orang Kiyowor, dan Sangapati komunitas Manusia pendatang pertama yang dikenal di Pulau Makeang adalah Papua Besi sebagai

kelompok etnik yaitu, orang Waigitang, orang Soma, orang Tahane, dan Poloiri yang mendiami wilayah Pulau Makeang di bagian Timur (sekarang Kecamatan Makeang Timur). Manusia pendatang pertama yang dikenal dengan nama Hamza Besi sebagai kelompok etnik yaitu, orang Wakiongyang mendiami wilayah Timur Pulau Makeang. Manusia pendatang pertama yang dikenal dengan nama Kursin sebagai kelompok etnik yaitu, orang Soma, orang Tahane, orang Mailoa, komunitas-komunitas ini mendiami wilayah Timur di Pulau Makeang. Manusia pendatang pertama yang dikenal dengan sebutan nama Kursan sebagai kelompok etnik, yaitu orang Sabaleh, orang Talapaon, orang Matiketeng, orang Tagono, orang Bubawae komunitas ini bermukim atau mendiami di wilayah Pulau Makeang di bagian Barat Pulau Makeang.

Sementara itu, informan jogugu kesultanan Ternate mengungkapkan bahwa...

Di kalangan masyarakat Makeang adalah termasuk kelompok masyarakat adat yang menempati jabatan-jabatan penting dalam sistem pemerintahan kesultanan Ternate, jogugu sebagai wakil kepala pemerintahan (wakil sultan) dan orang Makeang juga sudah masuk sekolah.

Sesungguhnya etnis Makeang tidak terlepas dari dunia imigrasi, berdasarkan migran lokal yang dianut oleh orang-orang Makeang. Banyaknya etnis Makeang menyebar dengan berbagai wilayah di Maluku Utara menyebabkan terjadinya letusan Gunung Kie Besi, hegemoni kekuasaan Ternate dan Tidore di antara hal tersebut, sehingga menimbulkan migran di dalam orang Makeang di tahun 1602, 1646, 1760, 1864, 1890, hingga 1970-an dan 1980-an. Namun secara eksplisit menekankan pada posisi etnis Makeang mencari nafka keluar, serta adanya tradisi tradisional Makeang untuk membentuk dan meredam perpecahan, maka dibentuklah perkampungan di wilayah

Maluku Utara dan selanjutnya berhasil putra-putri Makeang menduduki jabatan-jabatan strategis distruktur pemerintahan, yaitu bidang politik, birokrasi, legislatif dan edukasi.

Etnis Makeang Dalam Struktur Politik Lokal di Ternate

Hasil selama penelitian ini dilakukan ditemukan bahwa, Thaib Armayin mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1982, dengan partai pertama yang ia rasuki adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari partai yang berlambang Ka'bah ini ia rasuki juga mengantarkan sosok Thaib Armayin menjadi Wali Kota pertama di Kota Ternate pada tahun 1982-1987 (Status Kota Administratif), Kota Ternate pada saat itu berada di Provinsi Maluku Ambon. Sosok Drs. Thaib Armayin bukan saja pada sebatas jabatan Wali Kota yang ia mumpuni. Jabatan-jabatan politik itu. Informan Ishak, menyebutkan bahwa...

Jabatan di bidang politik yang pernah dijabat oleh Thaib Armayin adalah jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maluku Utara pada tahun 1997-2000. Selanjutnya JY menambahkan pula bahwa Thaib juga menjabat gubernur Maluku Utara pertama dan kedua (dua periode) jabatan-jabatan yang telah disebutkan diatas, dalam kedua jabatan karir politik itu berdasarkan hasil negosiasi dan kepantasan sesuai dengan syarat kepangkatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Drs. Thaib Armayin dalam posisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka ia yang berhasil yang memperoleh jabatan Wali Kota di Pemerintah Kota Ternate dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Utara.

Informan A.B mengungkapkan bahwa...
Periode kepengurusan tahun 2004-2009 dibawa kepemimpinan Thaib Armayin, terus mengupayakan memenuhi harapan-harapan untuk masyarakat Maluku Utara, bahkan lebih meningkatkan program kerja non—fisik dan fisik pada delapan Kabupaten Kota di Maluku Utara. Dalam lima tahun terakhir,

menyangkut program kegiatan di bidang pembinaan, infrastruktur telah ditunjukkan oleh pemukiman kembali para pengungsi pada daerah asal.

Informan T.A menegaskan bahwa...

Untuk melanjutkan, bahwa meningkatkan program yang pernah dilaksanakan oleh bidang-bidang terdahulu merupakan sesuatu yang agak berat. Diperlukan adanya pembenahan terutama peningkatan sumberdaya dan aktifitas pengurus dalam arti seluruh sub-sistem yang ada harus mendukung secara integral dari sistem birokrasi pemerintahan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya kerajaan Makian di abad 13, etnis Makeang dimasa kesultanan menempati posisi-posisi penting dan fluktuatif. Karir politik lokal etnis Makeang Maluku Utara (kota Ternate) mulai cemerlang bahkan prestasinya cenderung terus mencapai puncak di masa awal kepemimpinan Thaib, dimana kekuasaan etnis Makeang kota Ternate mengalami “mendominasi”, baik itu dalam bidang politik, birokrasi, legislatif, dan edukasi, maupun dalam konteks penatalaksanaan manajemen roda pemerintahan, mulai di tingkat daerah (Kota) hingga ke tingkat (Kabupaten) dan Provinsi. Thain Armayin selaku Gubernur pertama dan kedua (dua periode), berhasil membangun infrastruktur di Maluku Utara pasca konflik sosial yang selama ini merupakan momok krisis sosial ekonomi dan menjadi kendala utama di dalam percepatan pembangunan Maluku Utara. Program-program infrastruktur ketika berada pada tataran program pemerintah Provinsi, maka mereka bersatu dan membangun komitmen bahwa semua yang dilakukan hanya berujung pada satu tujuan, yaitu prestasi untuk Maluku Utara.

Keberhasilan-keberhasilan yang dicetuskan oleh Thaib Armayin merupakan salah satu bentuk reproduksi identitas yang tinggi dari seorang Thaib

dalam membangun kekuasaan dan praktek-praktek perpolitikan di Maluku Utara, khususnya dinamika politik lokal dan pembangunan infrastruktur serta sektor bidang lainnya. Program pemerintah Provinsi yang dicetuskan oleh Thaib membuat daerah Maluku Utara kondusif disebabkan konflik sosial dan krisis ekonomi masyarakat merupakan salah satu menjadi tanggungjawab serta menjadi program utama dan perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bagi masyarakat ataupun daerah Maluku Utara, kepemimpinan Thaib Armayin telah menjadi “tulang punggung” di setiap program kerja, baik di tingkat birokrasi pemerintahan. Daerah ini menjadi salah satu “kondusif” dari konflik sosial dan krisis ekonomi masyarakat dan pembangunan di setiap sektor pembangunan infrastruktur, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun pembangunan infrastruktur lainnya. Apa yang telah dicapai oleh Thaib turut menguatkan prestise etnis Thaib selaku gubernur yang berdampak langsung pada prestise dan pamornya dalam konteks jabatan politiknya sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di Maluku Utara.

Bourdieu (1990), dalam melihat fenomena relasi antara aktor, konsep habitus (adat kebiasaan), capital (modal), dan *field* (arena perjuangan), terkait amat erat, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk bisa berhasil bernegosiasi dan berkontestasi dalam arena, tentunya perlu mempunyai habitus dan kapital yang tepat untuk arena itu. Menurut Bourdieu, arena politik sebagai jaringan hubungan sosial, sistem terstruktur, dari posisi sosial, dimana perjuangan atau manuver perebutan sumber daya, wilayah dan akses dilakukan serta diperebutkan oleh aktor-aktor sebagai bentuk akumulasi dan monopoli jenis-jenis modal (kapital) yang beragam.

Penulis melihat bahwa, dinamika politik lokal di dalam arena kekuasaan etnis Makeang, maka aktor politisi dalam etnis Makeang mendapatkan habitus yang tepat dan menawarkan modal untuk mampu mendapatkan dukungan, mampu memperluas dan mempertahankan jaringan, mampu bernegosiasi dan memposisikan aktor-aktornya dalam lingkungan Makeang. Thaib adalah pejabat pemerintahan tertinggi di Maluku Utara (gubernur), maka habitus yang paling kuat adalah habitus politik. Olehnya itu, etnis Makeang harus bermain dalam ranah politik yang diawali dengan memasuki arena politik. Dalam konteks ini, etnis Makeang sebagai indukkekuasaan yang menaungi sejumlah “bidang” etnis Makeang, dimana masing-masing memiliki aktor politik. Mereka itulah yang menjadi pengambil keputusan di dalam keterlibatan aktor-aktor perpolitikan sekaitan dengan relasinya terhadap kekuasaan etnis Makeang, yang diwakili oleh aktor politik itu sendiri. Keterlibatan etnis Makian dan perpolitikan dalam kontestasi kekuasaan etnis Makeang bukan merupakan hal yang tidak disengaja tapi secara sadar dilakukan, baik diawali keinginan politisi dalam peerpolitikan maupun dari aktor politik, atau bahkan kedua-duanya. Keduanya berada dalam suatu fenomena sosial-budaya dan politik, atau berkaitan erat dengan struktur yang berisi peranan dan aturan-aturan yang berfungsi secara sosial. Tindakan-tindakan antara kelompok Makian yang berada dalam konteks “politik lokal” secara umum dan dalam konteks “perpolitikan” dijadikan tolak ukur dalam dinamika riasi yang terjalin diantaranya.

Etnis Makeang yang berada pada struktur birokrasi ataupun politik melakukan strategi-strategi sekaitannya dengan posisi mereka dalam pasar kompetisi dimana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, simbolik)

digunakan dan disebarakan untuk mendapatkan akses terhadap posisi-posisi dalam arena kekuasaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa yang menjadi model etnis Makeang sebagai kekuasaan di Ternate Maluku Utara terdiri dari modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, loyalitas, dan integritas, modal budaya berupa ideology dan hirarki, serta modal simbolik berupa prestise. Sementara itu di lain pihak, modal ekonomi diakui masih agak lemah dan membutuhkan perhatian dari pemilik modal yang lebih besar. Sebagai penyeimbang dari kebutuhan “modal ekonomi”, maka Thaib selaku gubernur mengandalkan relasi jaringan-jaringan dan strategi Thaib di berbagai sektor, baik dalam lingkungan struktur pemerintahan sendiri ataupun di luar struktur, seperti organisasi nonformal ataupun masyarakat lainnya.

Dalam pentas politik etnis Makeang, apalagi dalam pertarungan kontestasi kekuasaan di Ternate Maluku Utara, Thaib membutuhkan jaringan dan massa yang mempunyai “habitus” perpolitikan dan afiliasi politik yang sama, sementara Thaib dengan kekuasaan modal struktur partai politik yang terstruktur dan massif hingga ke tingkat daerah, berimplikasi pada negosiasi posisi politik di lingkungan Thaib. Keterlibatan aktor-aktor partai politik ataupun komunitas sebagai pengawal Thaib selaku aktor politik, mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih Thaib, minimal pada lingkungan internal etnis di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Hal tersebut (setidaknya) juga membuktikan bahwa etnis Makeang yang dalam struktur politik pada hakikatnya adalah penguasa “dominan”, dominan “status sosial” dan dominan “prestasi”, ternyata berpotensi memiliki kekuatan politik yang signifikan untuk berkompetisi dalam arena kontestasi kekuasaan.

Semua itu menjadi “nilai tawar” dalam relasinya dengan etnis Makeang selaku suku dominan dan aktor politik dalam struktur kekuasaan dan meenjadi sumber daya yang efektif di ruang sosial tertentu yang memungkinkan aktor-aktor Makian untuk memastikan adanya keuntungan khusus yang timbul dari partisipasi dan kontestasi di dalamnya sekaitannya dengan relasinya terhadap Thaib. Hubungan-hubungan relasional yang terjalin antar aktor dengan etnis lain akan terasa lebih cair, meskipun nampaknya bagi orang awam akan menganggapnya sesuatu yang rumit karena berselimut kabut birokrasi. Namun jika ditelaah lebih kritis, maka relasi kuasa yang terjalin dalam membangun kekuasaan di Kota Ternate tidak serta merta hanya bersifat politis, akan tetapi lebih mengarah ke profesionalitas.

Dengan demikian, maka bentuk relasi kuasa yang bermain dalam struktur “perpolitikan” dan dalam struktur “partai politik” terhadap Thiab selaku aktor politik adalah cenderung berpola atas-bawah. Hal ini dikarenakan bahwa bentuk relasi antar kekuasaan terikat sebuah tradisi budaya, dimana posisi etnis Makeang berada di atas dan sumber daya manusia tetap berada di atas. Sementara relasi kekuasaan dengan etnis Makeang selaku aktor politik, maka bentuk relasi di antar keduanya adalah equal (sama atau terkait). Hal itu disebabkan karena implikasi relasi yang terjalin di antara keduanya sama-sama menguntungkan. Dualisme pola relasi antar aktor terhadap Thaib, dikarenakan Thaib memiliki dua lingkungan habitus, yaitu habitus sebagai seorang putra daerah dan habitus sebagai tokoh politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Makeang dari periodisasi sejarah dan sejarah telah mengharumkan nama Provinsi Maluku Utara dan nusantara hingga mancanegara. Dikenal sebagai pulau penghasil rempah-rempah (cengkih, pala,

dan tembakau) dan merupakan sebuah pulau kecil dari beberapa pulau di kepulauan Maluku Utara. Dalam dinamika historik tersebut terdapat beberapa penyebutan penamaan pulau dan penduduknya. *Pertama*, berdasarkan pada catatan masa kolonial yakni: nama kerajaan di kawasan tersebut disebut *Makyan, Machian dan Makian*. *Kedua*, penyebutan penyebutan masyarakat lokal kawasan tersebut disebut “Taba”, “Mara(h)”, dan “Moy”. Soal penyebutan nama tersebut, penulis lebih cenderung menggunakan nama Makeang. Mereka yang saat ini disebut orang Makeang adalah penduduk lokal yang menempati posisi populasi terbanyak kedua dari beberapa etnis yang ada di Maluku Utara. Di Ternate, mereka adalah pendatang (migran lokal) yang hidup menetap di Kota Ternate, keberadaan mereka pada saat ini di Ternate menurut Kapela Kecamatan Kota Ternate Selatan, mereka menyebar di kecamatan dan kelurahan di sepanjang Kota Ternate. Orang Makeang sebagai etnis dominan dalam struktur sosial dari beberapa etnis (Ternate, Tidore, Sanana, dll) yang hidup menetap di Kota Ternate Maluku Utara. Meskipun “orang luar”, tetapi orang Makeang mendominasi politik lokal, birokrasi, dan edukasi. Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran orang Makeang yang menduduki posisi penting di pentas politik lokal (Gubernur Maluku Utara, Walikota Ternate, dan legislatif). Eksistensi orang Makeang di jalur politik, birokrasi, dan edukasi tersebut disebabkan berfungsinya kapital (intelektual, ekonomi, dan jaringan) untuk menarik simpati orang Makeang maupun orang non Makeang. Penelitian ini telah memulai satu langkah awal untuk menguak dan memotret salah satu bagian yang sumir dalam potret perilaku politik lokal di Kota Ternate Maluku Utara. Sebagai saran hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam mendapatkan

gambaran profil orang Makeang yang berkiprah dalam pentas politik lokal di Ternate, Maluku Utara umumnya. Selanjutnya studi ini juga memberikan ulasan tentang identitas dan Praktik-Praktik politik lokal yang dilakukan oleh komunitas Makeang, termasuk studi kasus kekuasaan di bidang politik, birokrasi, dan edukasi. Selanjutnya penelitian ini tentu saja masih menyisakan banyak kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam eksplorasi seputar dinamika kesejarahan orang Makeang. Kekurangan penelitian, ataupun hal-hal yang belum tercakup dalam penelitian ini dapat menjadi perhatian terpenting bagi peneliti lokal khusus dikalangan ilmu sejarah dan antropologi yang tertarik mempelajari tema serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti. & Faisal A. (2007). “*Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan*” dalam Henk Schulte Nordholt, dkk. (Editor). *Politik Lokal di Indonesia*. KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Bourdieu. (1990). *Outline of Theory of Practice*. London. Cambridge University Press. bi, dan Jhon Rinaldi. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Barth. (1998). *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Denzin K. dkk. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemahkan dari judul asli *Handbook of Qualitative Research* oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata A
- Fahmi M. (2011). *Pembentukan Elit Politik Di Dalam Etnis Bugis dan Makassar Menuju Hibriditas*



- Budaya Politik*. Disertai Sekolah Bogor Sekolah Pasca Sejana IPB.
- Idrus N.I. (2003). *“To Take Eac Other”*: *Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage*. Disertai. Canberra: Departement of Antrhopology Division of Society and Enviroment Research School of Pasific and Asia Studies-The Australian National University.
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Cetakan Kedua. Jakarta.penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Muhammad S. (2004). *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*. Yogyakarta Ombak.
- Rudyansyah T. (2009). *Kekuasaan, Sejarah Dan Tindakan* Jakarta:Rajawali Pers.
- Saifuddin A.F (2005). *Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Prenada Media.
- Yanuarti dkk. (2004). *Konflik Maluku Utara (Penyebab, Karakteristik, Dan Penyelesaian Jangka Panjang)* Jakarta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.